

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkhusus Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) yang menjabarkan kondisi dari kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung. Tahun yang digunakan atau yang akan menjadi bahan analisis pada penelitian ini yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung ini diperoleh penulis melalui *website* resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bandung yaitu [PPID Kab. Bandung \(bandungkab.go.id\)](http://ppid.kab.bandung.go.id). Sedangkan Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) yang terkhusus pada Indikator Kesehatan, Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Pendidikan Tahun 2019-2021 diperoleh penulis melalui *website* resmi [Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung \(bps.go.id\)](http://bps.go.id)

B. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan metode studi pustaka untuk pengumpulan data. Penelitian pustaka, yang juga dikenal sebagai studi pustaka, adalah kegiatan sistematis yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan penarikan kesimpulan dari data

menggunakan prosedur tertentu. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam suatu penelitian (Khitbah, 2011).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui *browsing* untuk mendapatkan literatur yang relevan dan bahan-bahan penelitian atau bisa disebut juga data yang diperoleh peneliti yaitu data sekunder seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021 yang diperoleh penulis melalui *website* resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bandung yaitu [PPID Kab. Bandung \(bandungkab.go.id\)](http://ppid.kab.bandungkab.go.id). Dan data-data lainnya seperti Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) yang terkhusus Indikator Kesehatan, Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021 yang diperoleh penulis melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung yaitu [Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung \(bps.go.id\)](http://badanpusatstatistik.kabupatenbandung.bps.go.id).

C. Operasional Variabel

Menurut Sujawerni (2014) Variabel penelitian merupakan aspek atau karakteristik tertentu dari suatu objek atau kegiatan yang sengaja dimanipulasi atau diamati oleh peneliti dalam rangka penelitian dan pengambilan kesimpulan. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, khususnya pada kategori Pendapatan Daerah. Kategori ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan jumlah keseluruhan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bandung

periode 2019-2021. Pengukuran variabel tersebut didasarkan pada rasio kemandirian keuangan daerah. Dan penjabaran tentang tingkat IKM dengan variabel pelengkap untuk menjabarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung meliputi kondisi kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021. Berikut adalah variabel operasional yang menjadi alat ukur pada penelitian:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan mengacu pada situasi di mana pemerintah daerah tidak bergantung pada sumber pendanaan eksternal yang berada di luar kendalinya atau rentan terhadap pengaruh dari dalam dan luar negeri. Berikut penulis sajikan formula dari kemandirian keuangan daerah.

Adapun Sebagai skala untuk melihat kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan Tabel dibawah ini.

$$\text{Kemandirian Keuangan Dearah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tabel 3. 1 Skala Interval RKKD

Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,00-50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber: Pasaribu et al. (2021)

2. Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM)

a. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan metrik penting untuk menilai kualitas pembangunan manusia di suatu lokasi. Ketahanan kesehatan masyarakat berkorelasi langsung dengan kemampuannya untuk memfasilitasi dan mendorong pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah membutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai. Semakin banyak dan berkualitas fasilitas kesehatan pada suatu daerah maka akan mendorong tingkat kualitas kesehatan menjadi lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib mendirikan minimal satu puskesmas di setiap kecamatan. Kegiatan ekonomi pada hakikatnya mengarah pada terwujudnya tingkat produksi penduduk di suatu wilayah, sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Maka tingkat kesehatan masyarakat dapat digambarkan dengan:

$$\text{Kesehatan} = \text{Jumlah fasilitas-fasilitas kesehatan}$$

Keterangan:

Kesehatan = Tingkat Kesehatan (Unit)

Jumlah Fasilitas-fasilitas Kesehatan = Jumlah RSUD, Jumlah

Puskesmas, Jumlah Puskesmas Pembantu dan Jumlah Apotek (Unit)

b. Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Proporsi signifikan individu yang hidup dalam kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di area tertentu juga substansial. Berikut Rumus Presentase Penduduk Miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik.

$$\text{Presentase Penduduk Miskin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk}}$$

Keterangan:

Presentase Penduduk Miskin = Presentase penduduk miskin (%jiwa)

Jumlah Penduduk Miskin = Jumlah penduduk miskin (jiwa)

Jumlah Seluruh Penduduk = Jumlah seluruh penduduk pada suatu wilayah (jiwa)

c. Tingkat Ketenagakerjaan Masyarakat

Pengangguran merupakan masalah utama yang menjadi perhatian pemerintah, sebab masalah ini sangat sensitif dan perlu segera diatasi guna mencegah dampak negatifnya terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Menurut (Pramono, 2021) Indikator ketenagakerjaan terdiri dari:

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi individu dalam rentang usia tertentu yang bekerja, dinyatakan sebagai persentase dari total populasi dalam rentang usia tersebut.

Humaira (2022) mengemukakan bahwa terdapat korelasi positif

antara TPAK dan pasokan tenaga kerja dalam suatu perekonomian, artinya ketika TPAK meningkat, maka ketersediaan tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa juga meningkat. Rumus perhitungan TPAK berdasarkan Badan Pusat Statistik:

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Bekerja usia 15 Tahun ke atas}} \times 100$$

Keterangan:

TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%jiwa)
Angkatan Kerja	= Jumlah penduduk Usia Kerja 15 tahun keatas (jiwa)
Bekerja usia	= Jumlah penduduk bekerja 15 tahun keatas dengan usia 15 tahun keatas (jiwa)

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT, sebagaimana didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik, adalah rasio jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan proporsi angkatan kerja yang termasuk dalam tingkat pengangguran. Menurut Humaira et al. (2022), TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak Angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Rumus perhitungan TPT berdasarkan Badan Pusat Statistik:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100$$

Keterangan:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Jumlah Pengangguran = Jumlah penduduk yang menganggur (jiwa)

Jumlah Angkatan Kerja = Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (jiwa)

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Menurut Sistem Informasi APK-APM pada *website* resmi APK-APM Kemendikbud, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu alat ukur atau rumus indikator kualitas pendidikan. Berikut adalah indikator rumus dari APK dan APM:

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah statistik yang membandingkan sekelompok siswa dengan tingkat pendidikan tertentu dengan keseluruhan siswa. Persentase digunakan untuk menyatakan APK. APK bertujuan untuk mengetahui berapa banyak siswa yang terdaftar di kelas tertentu. Seiring dengan peningkatan nilai APK (Adjusted Primary Completion), mencapai atau melebihi 100%, terjadi peningkatan yang sesuai dalam pendaftaran anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu atau penurunan jumlah anak

yang belum berusia sekolah. Rumus dari APK adalah sebagai berikut:

$$APK = \frac{\text{Siswa Sekolah}}{\text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$$

Keterangan:

APK = Angka Partisipasi Kasar (%jiwa)

Siswa Sekolah = Jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tanpa melihat umur siswa (jiwa)

Penduduk Usia Sekolah = Kelompok siswa usia standar di setiap jenjang Pendidikan (jiwa)

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah metrik yang membandingkan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia tertentu dengan jumlah keseluruhan penduduk kelompok usia tersebut.

APM dinyatakan dalam persentase. Tujuan APM adalah untuk memastikan pendaftaran anak usia sekolah pada jenjang pendidikan yang tepat. Terdapat korelasi positif antara Rasio Murid-Guru Rata-rata (APM) dan pendaftaran anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, sesuai persyaratan usia resmi.

Nilai optimalnya adalah 100%. Rumus APM adalah sebagai berikut:

$$APM = \frac{\text{Siswa Usia Sekolah}}{\text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$$

Keterangan:

APM = Angka Partisipasi Murni (%jiwa)
 Siswa Usia Sekolah = Jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang sesuai dengan usia standar pada jenjang masing-masing (jiwa)

Penduduk Usia Sekolah = Kelompok siswa usia standar di setiap jenjang pendidikan (jiwa)

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan teknik deskriptif. Dengan menggunakan metodologi kuantitatif, peneliti dapat menyajikan representasi data yang terkumpul secara tepat dan komprehensif, sehingga membantu dalam proses interpretasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh (Sudirman & Sriwahyuningrum, 2023). Metode deskriptif melibatkan penjelasan situasi yang diteliti dengan memanfaatkan studi pustaka untuk meningkatkan analisis peneliti dan memperoleh pemahaman yang konklusif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengukuran sosial dan mengeksplorasi serta mengklarifikasi fenomena atau realitas sosial (Mulyani, 2021).

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu dengan menghitung rasio keuangan dalam bentuk rasio kemandirian keuangan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021. Setelah hasil rasio keuangan dalam bentuk kemandirian keuangan daerah, penelitian ini akan menjelaskan

kondisi kesejahteraan masyarakat yang meliputi tingkat kesehatan, tingkat kemiskinan, tingkat ketenagakerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung. Setelah itu peneliti akan menghubungkan kondisi kemandirian keuangan daerah menggunakan alokasi belanja untuk masing-masing tingkat kesejahteraan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang meliputi kondisi kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021. Data yang terkumpul akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan penggunaan pengukuran lebih lanjut. Penelitian ini melakukan analisis data dalam tahap-tahap berikut:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021 dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung (kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan) untuk tahun 2019-2021.
2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan data PAD dan Total Pendapatan Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan menghitung kesejahteraan masyarakat melalui indeks kesejahteraan masyarakat (kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan).
3. Menjelaskan interpretasi atas hasil perhitungan rasio berdasarkan kriteria rasio kemandirian keuangan daerah dan juga indeks

kesejahteraan masyarakat (kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan).

4. Menganalisis perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun pada periode penelitian 2019-2021, apakah terjadi peningkatan atau penurunan dari rasio kemandirian keuangan daerah dan indeks kesejahteraan masyarakat (kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan), serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan nilai rasio dan indeks kesejahteraan masyarakat.
5. Menarik kesimpulan terkait dengan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat (kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan) Kabupaten Bandung.
6. Menarik kesimpulan terkait dengan kontribusi kemandirian keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dengan menggunakan alokasi belanja daerah untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Tabel 3.2 merupakan alat ukur yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 3. 2 Alat Ukur

Variabel	Formula
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Dearah = $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kesehatan = Jumlah fasilitas-fasilitas kesehatan
Tingkat Kemiskinan Masyarakat	Presentase Penduduk Miskin = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk}}$

Variabel	Formula
Tingkat Ketenagakerjaan Masyarakat	TPAK = $\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Bekerja usia 15 Tahun ke atas}} \times 100$
	TPT = $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100$
Tingkat Pendidikan Masyarakat	APK = $\frac{\text{Siswa Sekolah}}{\text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$
	APM = $\frac{\text{Siswa Usia Sekolah}}{\text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti Tahun 2024

